

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, judul yang diambil beserta alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, metode yang dipakai dalam pemecahan masalah, dan sistematika penulisan.

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengadaan barang/jasa dimulai dari sejak adanya transaksi pembelian/penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Pada perkembangannya transaksi tersebut mengarah ke pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui proses pelelangan.

Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi yang dimaksud bukan saja dari segi teknologi Konstruksi namun juga Teknologi Elektronik yang berkembang begitu pesat. Apa yang dahulu tidak mungkin dilakukan, kini dapat mungkin dilakukan karena ketersediaan sarana prasarana yang canggih.

Bidang Jasa Konstruksi selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dari segi : Biaya, Mutu, dan Waktu (BMW). Guna memenuhi standar BMW yang lebih baiklah maka terjadi inovasi-inovasi baru di bidang Jasa Konstruksi. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi termasuk bidang yang mengalami inovasi karena perkembangan teknologi Informasi. Apalagi dengan kebijakan dan Regulasi Pemerintah Yang terus menerus disempurnakan sehingga hal ini mempengaruhi tata cara dan sistem yang telah terbentuk.

Pada Sistem Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia telah mulai diterapkan sistem *e-procurement*. Sistem lelang ini telah mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya semenjak tahun 2003. Pada Sistem *E-procurement* seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet (*website*). Semakin luasnya akses internet oleh masyarakat khususnya di lingkungan pelaku bisnis konstruksi telah menjadikan *E-procurement* ini feasible diterapkan dan menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintahan yang modern.

Pengadaan Barang dan Jasa oleh pemerintah perlu di reform lebih lanjut karena :

- Volume belanja pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang lewat pengadaan barang/ jasa pemerintah cukup besar, sekitar sembilan triliun rupiah pada periode 2005-2006, belum termasuk di sektor Migas US \$ 5 milyar/ Tahun¹.
- Menjadi alat/ instrumen untuk peningkatan *good governance* dan pelayanan publik, serta pencegahan korupsi.
- Meningkatkan daya saing bangsa dengan membudayakan persaingan sehat diantara pelaku usaha dalam negeri.

Sistem tender secara elektronik ini dimaksudkan untuk memutuskan pertemuan secara fisik antara peserta dengan panitia tender. Perubahan sistem lelang dari konvensional menjadi sistem *e-procurement*/ sistem lelang elektronik membutuhkan prasyarat pelaksanaan dalam bidang hukum, teknis pelaksanaan dan manajemen agar sistem *E-procurement* memenuhi tujuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik yang diadakan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) ditinjau dari karakteristik prasyarat pelaksanaan.

¹ Direktorat Sistem Dan Prosedur Pendanaan Bappenas, Bahan Presentasi "Mengapa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu Di-Reform"

1.3. JUDUL

Untuk mendapatkan suatu identitas yang jelas dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis memberikan judul "Kajian Kelayakan Pelaksanaan Sistem Lelang Elektronik (*E-procurement*) Pada Instansi Pemerintah ditinjau dari Prasyarat Pelaksanaan."

1.4. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Sistem lelang di Indonesia mengalami perubahan. Dari konvensional, menuju Sistem lelang elektronik. Perubahan itu terjadi bertahap karena sistem lelang elektronik memerlukan prasyarat yang berbeda dengan sistem lelang konvensional. Ada 3 bidang prasyarat yang harus dipenuhi yaitu hukum, teknis, dan manajemen. Tanpa kesiapan dalam bidang itu, maka lelang elektronik tidak dapat mencapai tujuannya. Penelitian ini semoga dapat mendukung penelitian-penelitian yang ada sebelumnya mengenai sistem lelang elektronik sehingga sistem lelang di Indonesia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan amanat pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

1.5. PEMBATAAN MASALAH

Dengan banyaknya segi yang dapat dibahas mengenai "Kajian Prasyarat Yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Sistem Lelang Elektronik (*E-procurement*) pada Instansi Pemerintah", maka pada penelitian ini penulis memberi batasan :

1. Sudut pandang yang diambil adalah Penyedia Jasa yang mempunyai hubungan dengan Jasa Konstruksi bidang Sipil.
2. Dibatasi bahwa obyek penelitian adalah Lelang Proyek untuk Penyedia Jasa yang mempunyai golongan Usaha Menengah/ Besar.
3. Kajian Kelayakan prasyarat yang tersedia dibatasi pada bidang informasi dan penegakan hukum, teknis pelaksanaan dan manajemen.
4. Pada kajian sistem, maka penelitian tidak membahas tentang dasar pertimbangan dan sistem penilaian dalam pemilihan kontraktor karena hal-hal tersebut pada sistem *E-procurement* diasumsikan sama dengan sistem konvensional.

5. Karena banyaknya perusahaan Penyedia Jasa di seluruh Indonesia, maka sample yang diambil hanyalah kota Jakarta saja.

1.6. METODE PEMECAHAN MASALAH

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis melakukan :

1. Studi literatur
2. Pengumpulan data lewat kuesioner
3. Pengolahan data
4. Pembahasan dan Analisa
5. Menarik kesimpulan dari hasil kajian.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan secara garis besar terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode pemecahan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengulas tentang teori umum mengenai sistem lelang dan hukum Jasa Konstruksi yang menyangkut sistem lelang di Indonesia, definisi dan pemaparan mengenai sistem lelang konvensional dan sistem lelang elektronik, definisi istilah istilah sistem lelang elektronik dan perkembangan sistem lelang di Indonesia.

Bab ini juga mengulas penelitian-penelitian yang relevan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang sifat dan bentuk penelitian, kerangka berfikir, hipotesis, alat pengumpul data dan data-data yang diperlukan, serta tahapan-tahapan penelitian

BAB IV DATA-DATA

Berisi tentang data lelang secara umum, data proses lelang studi kasus, hasil kuesioner dan wawancara, hasil pengolahan data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berisi tentang pembahasan dan analisa sistem lelang elektronik pada proyek yang menjadi obyek studi kasus.

BAB VI KESIMPULAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan studi yang dilakukan.

Bab Pendahuluan memberikan gambaran umum, dan garis besar penelitian. Sedangkan masing-masing detail tahapan penelitian akan dibahas di Bab 3.

